Analisis Pengaruh Dana Bantuan Pembangunan dalam Rangka Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat

Armi Bakar

Universitas Indraprasta PGRI
Jl. Nangka Raya No.58 C, Jakarta

Rizal Rahmawan*

STIE Nusantara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan efektivitas dana bantuan pembangunan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan pembangunan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Analisis regresi dengan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Dalam menangani data yang tidak berdistribusi normal, peneliti melakukan transformasi data dengan logaritma natural. Peneliti menemukan variabel lain yang terkait erat dengan ketimpangan pendapatan dalam pembahasan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sektor industri.

Kata kunci: *dana bantuan, pembangunan, ketimpangan pendapatan, logaritma natural*

*) Corresponding Author: rizal.stietn@gmail.com

PENDAHULUAN

Aspek Keadilan dan pemerataan dapat ditinjau berdasarkan hubungan Nasional, tetapi juga dapat ditinjau menurut antar daerah. Secara Nasional, menunjukkan apakah pendapatan antar individu atau kelompok anggota masyarakat sudah adil dan merata. Sementara itu antar daerah menunjukkan pemerataan yang terjadi baik antar daerah, antar provinsi maupun antar kabupaten/kota. Pengertian tentang ketimpangan (disparitas) ekonomi banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi antara lain menurut Debraj Ray (2010) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan “dasar dari disparitas individu yang membolehkan memiliki sesuatu barang, benda (material) pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama”. Menggunakan *Wilioamson index* (Indeks wiliamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008). Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembangunan desa akibat dari timpangnya pembangunan kemiskinan antara desa dan kota. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia sendiri berada di wilayah desa. Hal tersebut sesuai dengan data dari BPS (2016) yang menyatakan bahwa pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,34 juta orang, sementara di daerah pedesaan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,67 juta orang. Adanya ketimpangan antara desa dan kota membuat arah pembangunan kini lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa dan daerah. (Arifiani & Sjaf, 2018)

Di Jawa Barat penggunaan pendapatan dan transfer dari pemerintah, Provinsi Jawa Barat mengalokasikan pada dua jenis belanja yaitu belanja daerah dan belanja modal di mana kegunaan masing-masing belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan porsi masing-masing. Realisasi belanja daerah dan belanja modal provinsi Jawa Barat. Belanja daerah pada tahun anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp27.752.682.415.573,12. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp24.642.731.222.290,00 (88,79%). Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Rp21.686.438.822.087,12 dan Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp6.066.243.593.486,00. Belanja Tidak Langsung dapat direalisasikan sebesar

Rp19.256.546.459.502,00 (88,80%), sedangkan Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp5.386.184.762.788,00 (88,79%).

Pada sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 naik dua kali lipat menjadi Rp55,3 triliun, dari alokasi tahun 2015 sebesar Rp27,1 triliun. DAK juga merupakan komponen penting dalam pembiayaan belanja daerah. Semakin meningkat DAK maka semakin baik pula DAK berkontribusi dalam pembiayaan belanja daerah. Keadaan ini menjadi sangat menarik untuk dikaji kaitannya dengan tingkat Ketimpangan yang tinggi pada provinsi Jawa Barat dan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat cukup besar.

Berdasarkan data di atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk mendanai Belanja Daerah daripada untuk mendanai Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah. Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga anggaran dari belanja daerah lebih besar dibanding belanja modal. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan sirkulasi negatif, yaitu “rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat atau bahkan dapat dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintah lebih atas” (Isdijoso dan Brahmantio, 2001:19).

Pemerintah provinsi Jawa Barat menggunakan DAU dan PAD, sehingga dilihat dari kemandirian keuangannya dapat dikatakan bahwa “Provinsi Jawa Barat telah mandiri dalam mengelola dan membiayai keuangan daerahnya menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah” (Sumardi dan Prasetyani 2011: 26). Penelitian ini berupaya untuk menganalisis apakah dana bantuan pembangunan memberikan pengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenku) tahun 2000-2015. Pada analisis data, peneliti melakukan transformasi data natural algoritma.

Logaritma alami adalah “Logaritma yang berbasis e , di mana e adalah 2,718281828459... (dan seterusnya)”. Logaritma alami terdefiniskan untuk semua bilangan real positif x dan dapat juga didefinisikan untuk bilangan kompleks yang bukan 0. Berikut adalah data asli dan data yang sudah di ubah ke bentuk logaritma natural. Fungsi $\ln$ adalah *invers* dan fungsi eksponensial (Gujarati, 2003:39).

Peneliti menggunakan variabel independen berupa Dana bantuan pembangunan, dan tingkat ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen. Setelah itu peneliti menguji normalitas data, dan melanjutkannya dengan menguji regresi linear sederhana dan koefisien determinasi. Hasil dari analisis tersebut akan menunjukkan nilai signifikan pengaruh variabel satu terhadap lainnya juga akan menunjukkan koefisien korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Di samping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tiga perempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat. PDRB Jawa Barat pada tahun 2003

mencapai Rp231.764 miliar (US\$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15% dari total Produk domestik bruto nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, Produk domestik bruto per kapita Jawa Barat adalah Rp5.476.034 (US\$644.24) termasuk minyak dan gas, ini menggambarkan 82,4% dan 86,1% dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21% termasuk minyak dan gas 4,91% termasuk minyak dan gas, lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. (US\$1 = Rp8.500).

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,41 persen di Kota Banjar hingga yang tertinggi sebesar 11,08 persen di Kabupaten Bogor.

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini ditunjukkan dengan tabel berikut

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Normalitas

Kelas	Jumlah Sampel	Lo	L_{tabel} $\alpha = 0,05$	Simpulan
Dana Bantuan Pembangunan Tingkat Ketimpangan pendapatan	16	0,3120	0,213	Tidak Normal
	16	0,70	0,213	Tidak Normal

Sumber: Diolah (2021)

Kedua variable memiliki data yang tidak terdistribusi normal, namun peneliti melakukan transformasi dalam bentuk logaritma natural. Menurut Fachrudin (2011) data yang menunjukkan bahwa residual data tidak memenuhi asumsi normalitas dapat ditransformasikan dengan *Logaritma Natural*. Grafik data kedua variable pun berubah dengan data berikut.

Gambar 1. Perubahan grafik data dana bantuan

Gambar 2. Perubahan grafik tingkat ketimpangan

Diagram di atas merupakan perubahan data dari uji normalitas setelah dilakukan *Logaritma Natural*. Selanjutnya peneliti melakukan Analisis Koefisien Korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan hubungan yang kuat (*strength*) antara dua variabel tersebut dan nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Berdasarkan hasil perhitungan di dapatkan nilai r_{xy} sebesar -0.0791. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan skala koefisien korelasi (Bab III tabel 3.3) terletak antara 0-0,25 yang berarti tingkat hubungan antar variabel dana bantuan pembangunan dan variabel tingkat ketimpangan pendapatan adalah sangat lemah.

Pada analisis koefisien determinasi peneliti mendapati hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0.00623%. Hal tersebut menunjukkan variabel dana bantuan pembangunan (X) mempunyai kontribusi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan (Y) sebesar 0.00623%. Sedangkan sisanya 99.994% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti misalnya faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta belum merata. Dengan persamaan regresi sebagai berikut $Y = -0.8734 - 0.0227X$ Persamaan regresi linier sederhana di atas artinya bahwa jika dana bantuan nilainya 0 atau konstan maka tingkat ketimpangan pendapatan adalah -0.8734% dan jika dana bantuan mengalami peningkatan 1%, maka akan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan Jawa Barat sebesar -0.0227%, begitu pula sebaliknya.

Lalu pada pengujian hipotesis ditemukan $t_{hitung} : t_{tabel} = -0.298 < 1.761$ jadi kesimpulan H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Dana bantuan pembangunan tidak memiliki pengaruh Terhadap Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat

Pembahasan

Pada hasil penelitian telah dibahas bahwa hasil dari perhitungan regresi dan korelasi tidak menunjukkan pengaruh bantuan pembangunan daerah terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Maka perlu analisa pada variabel lainya hal apa yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan tersebut. Pada analisis lain ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sebagaimana penelitian yang dilakukan Dastiar (dalam Nangarumba, 2015) pada Negara berkembang terjadi kondisi di mana sektor jasa dan industri lebih dominan dari pertanian. Kondisi ini ternyata meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan umumnya pada negara berkembang lebih mengutamakan majunya sektor industri dan cenderung meninggalkan sektor pertanian. Padahal sektor pertanian memiliki banyak tenaga kerja, namun kurang terdidik. Angkatan kerja di sektor pertanian inilah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Sedangkan di negara maju berkembangnya sektor jasa dan berkurangnya pangsa sektor industri dan pertanian, akan mengurangi dalam ketimpangan pendapatan.

Pada hasil penelitian lain, faktor lain seperti peningkatan upah minimum justru meningkatkan kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan. (Sari Nurmalisa Sungkar, 2015). Selanjutnya kesenjangan pendapatan yang melebar akan diperparah dengan tingkat kesehatan yang akhirnya menjadikan masyarakat tidak produktif, seperti penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan (diukur dengan koefisien Gini) berpengaruh signifikan terhadap status kesehatan ketika kita mengontrol tingkat pendapatan, tabungan dan pendidikan. Hubungan tersebut konsisten terlepas dari spesifikasi status kesehatan dan pendapatan. Dengan demikian, hasil studi memberikan beberapa dukungan empiris untuk hipotesis ketimpangan pendapatan. (Asafu-Adjaye, 2004).

Hal tersebut didukung oleh penelitian Ledić & Rubil (2019) yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan variabel selain pendapatan yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut. Peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya atau penelitian lebih dalam terkait kesehatan dan pendidikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan.

PENUTUP

Pengujian regresi yang tidak memberikan nilai signifikan antar dua variabel, menjadikan penelitian tentang bantuan pendapatan daerah terhadap ketimpangan pendapatan lebih dekat menemukan variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Contoh saja pendidikan dan kesehatan yang ternyata erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan. Pertanian juga merupakan sektor yang perlu dikembangkan karena menjadi tumpuan masyarakat banyak. Hakim (2009) mempertimbangkan sumbangan ekonomi pada sektor pertanian, maka seharusnya industrialisasi yang dijalankan distimulus dan didasarkan pada sektor tersebut sehingga tidak akan mengganggu kondisi ketenagakerjaan. Jika model industrialisasi ini yang ditempuh, maka dua hal penting segera akan dicapai; di satu sisi akan diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai dan di sisi lainnya jumlah tenaga kerja yang dapat terlibat dalam proses industrialisasi sangat banyak. Dengan begitu adanya proses industrialisasi yang diakselerasi di Indonesia tidak akan menimbulkan banyak masalah seperti yang terjadi di banyak negara, misalnya pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memfokuskan pengembangan pada pendidikan, pertanian, dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(3), 317–332. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.3.317-332>
- Asafu-Adjaye, J. (2004). Income inequality and health: A multi-country analysis. *International Journal of Social Economics*, 31(1–2), 195–207. <https://doi.org/10.1108/03068290410515501>
- Fachrudin, K. A. (2011). Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency Cost Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.9744/jak.13.1.37-46>
- Hakim, M. (2009). Industrialisasi Di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 11(1), 370–47. <https://doi.org/10.28918/jhi>
- Ledić, M., & Rubil, I. (2019). Decomposing the difference between well-being inequality and income inequality: Method and application. *Research on Economic Inequality*, 27, 105–122. <https://doi.org/10.1108/S1049-258520190000027008>
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, 7(2), 9–26.
- Purwaningsih. (2008). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jantra*, 3(6), 443–452.
- Sari Nurmalisa Sungkar, N. (2015). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 40–53.

Vol. 3, No. 1,
April 2021,
pp. 147-151

e-ISSN:
2686-5009

**Analisis
Pengaruh
Dana Bantuan
Pembangunan
dalam Rangka
Mengurangi
Ketimpangan
Pendapatan
di Provinsi
Jawa Barat**

Armi Bakar
R. Rahmawan